

Peran Penyuluh Perikanan dalam Pengembangan Kelompok Nelayan di Kelurahan Sumpang Binangae Kabupaten Barru

The Role of Fisheries Extension Officers in Empowering Fishermen Groups in Sumpang Binangae Village, Barru Regency

Febri Yanti Panjaitan¹, Benny Audy Jaya Gosari^{1✉}, Firman¹, Sitti Fakhriyyah¹, Endah Murpi Ningrum²

¹Program Studi Agrobisnis Perikanan Departemen Perikanan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin

²Program Studi Peternakan Departemen Produksi Ternak, Fakultas Peternakan, Universitas Hasanuddin

✉corresponding author: bennygosari5@gmail.com

Abstrak

Penyuluh perikanan merupakan aktor strategis dalam membina dan memberdayakan kelompok nelayan menuju pengelolaan usaha perikanan yang produktif dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peran penyuluh perikanan sebagai fasilitator, komunikator, dan motivator serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pengembangan kelompok nelayan di Kelurahan Sumpang Binangae, Kabupaten Barru. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan kuesioner yang disebarkan kepada 18 responden dari tiga kelompok nelayan. Hasil menunjukkan bahwa peran penyuluh sebagai fasilitator dinilai berperan (66,7%), sebagai komunikator sangat berperan (72,2%), dan sebagai motivator berperan (55,6%). Kendala utama meliputi minimnya tenaga penyuluh, keterbatasan waktu nelayan, dan sarana penyuluhan yang kurang memadai. Implikasi dari hasil ini menunjukkan pentingnya penguatan kelembagaan penyuluhan berbasis partisipatif dan berorientasi pada pemberdayaan komunitas pesisir secara holistik.

Kata kunci: penyuluh perikanan, kelompok nelayan, partisipasi, pemberdayaan, agrobisnis perikanan

Abstract

Fisheries extension officers play a strategic role in empowering and developing fishermen's groups toward sustainable and productive agribusiness. This study aims to evaluate the roles of fishery extension officers as facilitators, communicators, and motivators, as well as to identify key challenges in the development of fishermen groups in Sumpang Binangae Village and Barru Regency. A descriptive quantitative approach was applied, with data collected through observations, interviews, documentation, and questionnaires involving 18 respondents from three groups of fishermen. The results indicated that the extension officer's role as a facilitator was perceived as "active" by 66.7% of respondents, as a communicator "very active" by 72.2%, and as a motivator "active" by 55.6%. The main challenges included a limited number of extension personnel, time constraints of fishermen, and lack of extension facilities and tools. These findings highlight the need to strengthen extension institutions through participatory, integrated, and community-based approaches to improve the effectiveness of fishery agribusiness development at the grassroots level.

Keywords: fisheries extension, fishermen group, participation, empowerment, fisheries agribusiness

Pendahuluan

Sektor perikanan dan kelautan merupakan salah satu sektor prioritas yang diharapkan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009, tujuan pembangunan perikanan adalah meningkatkan kesejahteraan nelayan dan menjaga kelestarian sumberdaya ikan dan ekosistemnya (Jasmine, et.al, 2019). Masyarakat yang hidup di daerah laut biasa disebut sebagai masyarakat pesisir. Sebagian besar masyarakat pesisir memiliki mata pencaharian sebagai nelayan. Kehidupan pesisir Indonesia

seharusnya menjadikan para nelayan sebagai orang yang kaya karena kekayaan laut Indonesia yang melimpah (Rio & Junianto, 2024).

Menurut UU No. 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup (Garudhea, 2018). Perikanan yang dimaksud adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan (Fitria, 2019).

Penyuluhan perikanan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, sumberdaya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitasnya, efisien usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup (Nur Hasanah, 2021). Penyuluh perikanan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk penyuluhan perikanan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban secara penuh yang diberikan oleh pejabat yang berwenang. Kinerja penyuluh perikanan merupakan perwujudan diri atas sejauhmana tugas pokoknya dapat dilaksanakan sesuai dengan patokan yang telah ditetapkan (Neni,et.al, 2023).

Penyuluh perikanan memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya peningkatan perekonomian masyarakat Indonesia khususnya di bidang kelautan dan perikanan, karena dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya merupakan tenaga yang banyak berhubungan langsung dengan pelaku usaha perikanan di lapangan terutama dengan nelayan, pengolah dan pembudidaya perikanan (Jumain, et.al. 2018). Kompetensi penyuluh adalah karakteristik yang melekat pada diri penyuluh yang menentukan keaktifan kinerja penyuluh dalam mengembangkan misi penyuluhan. Kinerja atau performansi adalah hasil kerja yang dapat dicapai seseorang atau kelompok orang dalam organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi (Nayu, et.al, 2023).

Penyelenggaraan penyuluhan perikanan diupayakan tidak menimbulkan ketergantungan pelaku utama dan pelaku usaha perikanan kepada penyuluh, akan tetapi diarahkan untuk mewujudkan kemandirian pelaku utama dan pelaku usaha perikanan dengan memposisikannya sebagai wiraswasta agribisnis, agar pelaku utama perikanan dapat mengelola usahanya dengan baik dan hidup layak berdasarkan sumberdaya lokal yang ada (Yenni, et.al, 2023). Hal ini membutuhkan kinerja penyuluh perikanan yang terintegrasi pada pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi penyuluh perikanan dalam merencanakan, mengorganisasikan, dan mengevaluasi program penyuluh perikanan (Noor, et.al, 2023).

Pengembangan kelompok nelayan adalah mengembangkan sistem perikanan yang berkelanjutan, dalam upaya mewujudkan tujuan tersebut diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berguna dalam menunjang pembangunan termasuk bidang perikanan (Rinda, 2017). Peningkatan kualitas ini tidak hanya dalam peningkatan produktivitas kelompok nelayan, namun dapat meningkatkan kemampuan mereka agar dapat lebih berperan dalam berbagai proses pembangunan. Dalam hal ini penyuluhan merupakan faktor yang penting dalam mewujudkan tujuan pembangunan bidang perikanan tersebut. Dimana daya dukung untuk pengembangan dan peningkatan potensi perikanan salah satunya ketersediaan profesionalisme penyuluh perikanan baik dari segi teknis pengelolaan potensi perikanan, kelembagaan pelaku utama maupun kelompok usahanya (Fitria, 2019).

Disamping itu, banyaknya waktu yang dihabiskan nelayan dalam kegiatan melaut juga menjadi penyebab nelayan masih kurang berminat mengikuti kegiatan penyuluhan. Waktu yang tersedia ketika nelayan pulang melaut biasanya digunakan beristirahat di rumah (Hurrul, et.al, 2017). Penyuluh hanya dapat memberi masukan dan informasi kepada nelayan hanya ketika nelayan sedang bersiap-siap untuk melaut dan waktu kosong yang tersisa dari segala kegiatan yang berhubungan dengan melaut. Kondisi ini dipersulit lagi dengan sedikitnya nelayan yang mau mendengar informasi tentang solusi dari masalah yang mereka hadapi kepada penyuluh (Nobertus, 2023). Terbatasnya tenaga penyuluh perikanan juga merupakan salah satu penghambat kegiatan penyuluhan yang dilakukan. Selain itu, terbatasnya jumlah tenaga penyuluh yang disediakan pada setiap Kecamatan yakni sekitar 2-3 orang dalam satu Kecamatan hal tersebut menjadi kendala yang dialami oleh kelompok nelayan dan penyuluh untuk menyampaikan informasi (Vinsensius, et.al, 2024).

Kelurahan Sumpang Binangae merupakan salah satu kelurahan di Kabupaten Barru, wilayahnya berada di wilayah pesisir sehingga sebagian besar mata pencaharian masyarakat sebagai nelayan. Sehingga di daerah tersebut terdapat beberapa kelompok nelayan yang dibina oleh penyuluh perikanan. Penyuluh perikanan yang bertugas pada Kelurahan Sumpang Binangae yakni ada 1 orang dengan membina sebanyak 10 kelompok nelayan di wilayah tersenut, tentunya hal ini menjadi sebuah tantangan bagi penyuluh dalam menyalurkan informasi untuk kelompok nelayan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif yang dilakukan pada bulan Agustus 2024 di Kelurahan Sumpang Binangae, Kabupaten Barru. Populasi dalam penelitian adalah kelompok nelayan dan penyuluh perikanan setempat. Sampel ditentukan secara purposive sebanyak 18 responden dari 3 kelompok nelayan, terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota.

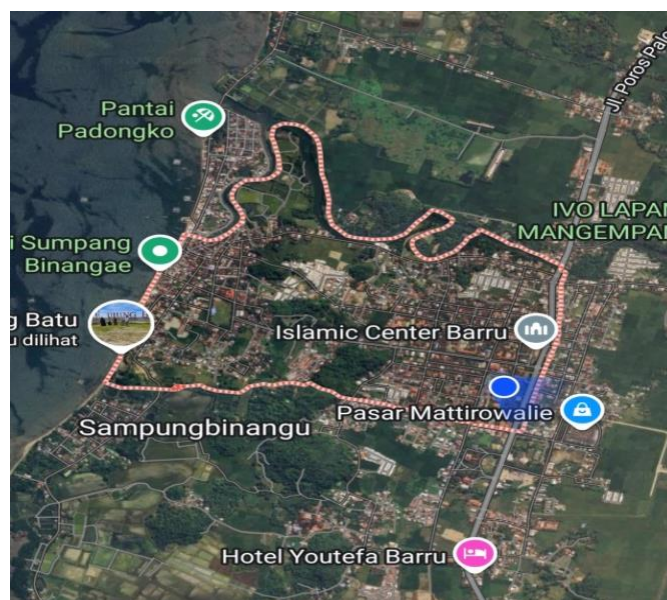
Instrumen utama adalah kuesioner berskala Likert, observasi partisipatif, dan wawancara mendalam. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif untuk mengukur persepsi terhadap peran penyuluh dalam tiga aspek: fasilitator, komunikator, dan motivator (Tabel 1 dan 2).

Tabel 1. Indikator Pengukuran Peran penyuluh Perikanan dalam Pengembangan Kelompok Nelayan di Kelurahan Sumpang Binangae Kabupaten Barru

Variabel	Sub Variabel	Indikator Pengukuran
Fungsi Pokok dan Tugas Penyuluh Perikanan	Peran Penyuluh Perikanan:	Kognisi : Pendampingan Motivator Penyampaian Informasi
	Peran Penyuluh Perikanan:	Kognisi : Waktu Tenaga Penyuluh Tempat

Tabel 2. Kategori dan Skala Likert

Kategori	Skala	Keterangan	
Fungsi Pokok dan Tugas Penyuluh Perikanan	5	Sangat setuju	Sangat terganggu
	4	Setuju	Terganggu
	3	Kurang setuju	Cukup terganggu
	2	Tidak setuju	Tidak terganggu
	1	Sangat tidak setuju	Sangat tidak terganggu



Gambar 1. Lokasi Penelitian

Hasil dan Pembahasan

Peran Penyuluh sebagai Fasilitator

Tabel 3. Kategori Penyuluh sebagai fasilitator

No	Tingkat Peran	Bobot (B)	Frekuensi (F)	Persentase (%)	B X F	Hasil
1	Sangat Berperan	4	6	33.3	24	Berperan
2	Berperan	3	12	66.7	36	
3	Cukup Berperan	2	0	0	0	
4	Tidak Berperan	1	0	0	0	
Total			18	100.0	60	

Sebanyak 66,7% responden menilai penyuluh “berperan” sebagai fasilitator. Dalam konteks agrobisnis perikanan, fasilitasi yang efektif mencakup pendampingan akses pasar, pelatihan manajemen usaha, serta penyusunan rencana aksi kelompok. Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh Wibowo et al. (2023) yang menegaskan bahwa fasilitator menjadi penggerak kemandirian nelayan dalam rantai nilai hasil tangkapan.

Namun, keterbatasan jumlah tenaga penyuluh menyebabkan intensitas pendampingan teknis menjadi rendah dan belum menjangkau seluruh siklus produksi agrobisnis perikanan secara menyeluruh. Padahal, menurut Pranata & Ismail (2022), penyuluh idealnya tidak hanya sebagai pemateri, tetapi juga sebagai broker sumber daya dan katalis inovasi lokal.

Peran sebagai Komunikator

Tabel 4. Kategori Penyuluh sebagai Komunikator

No	Tingkat Peran	Bobot (B)	Frekuensi (F)	Persentase (%)	B X F	Hasil
1	Sangat Berperan	4	13	72,2	52	Berperan
2	Berperan	3	5	27,8	15	
3	Cukup Berperan	2	0	0	0	
4	Tidak Berperan	1	0	0	0	
Total			18	100.0	67	

Sebanyak 72,2% responden menyatakan bahwa penyuluh “sangat berperan” sebagai komunikator. Komunikasi yang dibangun bersifat dua arah, memungkinkan terjadinya dialog dan pertukaran informasi antara penyuluh dan nelayan. Penggunaan media digital seperti WhatsApp menjadi inovasi penting, meskipun masih terbatas pada nelayan yang melek teknologi.

Hal ini sejalan dengan literatur terbaru (Setiawan & Mahdalena, 2024) yang menyatakan bahwa penyuluhan digital berbasis aplikasi komunikasi cepat mendorong adopsi inovasi pada komunitas pesisir. Namun, rendahnya literasi teknologi pada sebagian nelayan masih menjadi tantangan yang perlu disikapi melalui pelatihan berbasis inklusi digital.

Peran sebagai Motivator

Tabel 5. Kategori Penyuluh sebagai Motivator

No	Tingkat Peran	Bobot (B)	Frekuensi (F)	Persentase (%)	B X F	Hasil
1	Sangat Berperan	4	10	55.6	40	Berperan
2	Berperan	3	8	44.4	24	
3	Cukup Berperan	2	0	0	0	
4	Tidak Berperan	1	0	0	0	
Total			18	100.0	64	

Sebanyak 55,6% responden menilai penyuluh “berperan” sebagai motivator. Penyuluh tidak hanya memberikan dorongan moral, tetapi juga menciptakan iklim kompetitif melalui pemberian penghargaan dan inspirasi dari kisah sukses nelayan lain. Konteks motivasional ini penting dalam membangun ketahanan sosial ekonomi komunitas pesisir yang rentan.

Penelitian oleh Handayani et al. (2023) menekankan bahwa motivasi dalam kelompok tani atau nelayan dipengaruhi oleh pendekatan afektif penyuluh, seperti empati, keterbukaan, dan penghargaan terhadap nilai-nilai lokal. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas soft skill penyuluh sangat penting sebagai bagian dari pendekatan penyuluhan partisipatif.

Peran Penyuluh Perikanan sebagai Fasilitator dalam Pengembangan Kelompok Nelayan

Penyuluh perikanan berperan penting sebagai fasilitator dalam mendukung kegiatan kelompok nelayan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara langsung di lapangan, penyuluh perikanan aktif melakukan kegiatan pendampingan teknis kepada kelompok nelayan, terutama dalam hal penanganan hasil tangkapan, pengelolaan kelompok, dan penyampaian informasi terkait program bantuan alat tangkap dari pemerintah. Dalam beberapa pertemuan kelompok, penyuluh juga membantu menyusun rencana kerja tahunan kelompok nelayan serta memberikan pengarahan terkait cara pencatatan hasil tangkapan dan keuangan sederhana. Para nelayan mengakui bahwa meskipun frekuensi pertemuan terbatas, kehadiran penyuluh sangat membantu dalam menyelesaikan persoalan internal kelompok dan mendorong kerjasama antarnelayan. Aktivitas ini menunjukkan bahwa penyuluh tidak hanya hadir secara simbolis, tetapi juga berfungsi nyata sebagai fasilitator yang mampu menjembatani kebutuhan kelompok nelayan dengan dukungan dari instansi terkait. Berdasarkan hasil kuisioner, sebanyak 66,7% responden menyatakan bahwa penyuluh “berperan”, dan 33,3% menyatakan “sangat berperan” dalam kategori fasilitator. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan penyuluh telah memberikan dampak positif dalam proses pendampingan dan pemberian akses terhadap informasi serta teknologi perikanan yang relevan.

Peran fasilitator oleh penyuluh ini sejalan dengan pernyataan Nur Hasanah et al. (2021), bahwa penyuluhan merupakan proses pembelajaran untuk membantu pelaku utama agar dapat mengakses informasi dan sumber daya yang dibutuhkan dalam meningkatkan produktivitas dan pendapatannya. Penyuluh di Kelurahan Sumpang Binangae telah membantu nelayan dalam pengembangan kelompok melalui bimbingan teknis, pengelolaan kelompok, dan penguatan

kelembagaan. Namun, jumlah penyuluh yang hanya satu orang untuk membina sepuluh kelompok nelayan menjadi tantangan tersendiri. Kondisi ini membatasi kemampuan fasilitasi yang maksimal, sebagaimana juga diungkapkan oleh Vinsensius et al. (2024), bahwa keterbatasan jumlah penyuluh di lapangan menjadi kendala signifikan dalam efektivitas program penyuluhan.

Peran fasilitator yang dijalankan penyuluh perikanan juga mencakup fungsi pemberdayaan. Penyuluh tidak hanya memberikan pengetahuan teknis, tetapi juga menumbuhkan kesadaran kritis nelayan terhadap pentingnya kelembagaan kelompok yang solid. Dengan membina kemampuan organisasi dan kepemimpinan di tingkat kelompok, penyuluh membantu menciptakan struktur kerja yang lebih terorganisir, yang dalam jangka panjang berdampak pada kemandirian kelompok nelayan. Fasilitator yang efektif harus mampu membina kapasitas kolektif masyarakat sasaran agar lebih mandiri dan berdaya dalam mengelola sumber daya perikanan secara berkelanjutan.

Namun demikian, agar peran fasilitator ini bisa dijalankan secara optimal, perlu adanya dukungan dari kelembagaan penyuluhan dalam bentuk peningkatan jumlah penyuluh, pelatihan rutin, dan penguatan jaringan kerja antarinstansi. Sebab, seorang penyuluh tidak hanya memerlukan pengetahuan teknis, tetapi juga keterampilan interpersonal dan kemampuan memfasilitasi proses perubahan sosial dalam kelompok. Tanpa dukungan tersebut, peran penyuluh sebagai fasilitator berpotensi terbatas pada penyampaian informasi semata, bukan pada pemberdayaan. Maka dari itu, strategi kolaboratif antara penyuluh, kelompok nelayan, dan pemerintah daerah menjadi kunci utama dalam memperkuat peran fasilitator dalam konteks pembangunan perikanan berbasis masyarakat.

Peran Penyuluh Perikanan sebagai Komunikator dalam Pengembangan Kelompok Nelayan

Sebanyak 72,2% responden menilai penyuluh sebagai komunikator “berperan” dan 27,8% “sangat berperan”. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan di lapangan, penyuluh perikanan menunjukkan kemampuan komunikasi yang baik dengan kelompok nelayan. Komunikasi dilakukan melalui berbagai cara, seperti tatap muka sebelum dan sesudah melaut, pertemuan kelompok secara berkala, hingga penggunaan media komunikasi seperti WhatsApp untuk menyampaikan informasi program bantuan, jadwal pelatihan, dan pengumuman penting. Responden menyebutkan bahwa penyuluh tidak hanya menyampaikan pesan satu arah, tetapi juga mendengarkan keluhan dan masukan dari anggota kelompok. Bentuk komunikasi dua arah ini menciptakan kedekatan emosional antara penyuluh dan nelayan, yang membuat kelompok merasa lebih dihargai dan diperhatikan dalam pengambilan keputusan terkait kegiatan kelompok. Ini menunjukkan bahwa penyuluh mampu menyampaikan informasi dengan jelas dan membangun komunikasi dua arah yang efektif antara dirinya dan anggota kelompok nelayan.

Menurut Garudhea (2018), komunikasi penyuluhan yang efektif sangat diperlukan dalam pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan. Di Kelurahan Sumpang Binangae, penyuluh berhasil menjembatani pengetahuan teknologi modern kepada kelompok nelayan yang sebagian besar memiliki latar belakang pendidikan menengah ke bawah. Meski begitu, waktu yang

terbatas akibat rutinitas nelayan melaut menyebabkan penyuluh hanya dapat berkomunikasi di sela-sela waktu luang nelayan. Hal ini memperkuat temuan Norbertus (2023) bahwa penyuluh sering kali kesulitan bertemu langsung dengan nelayan karena jadwal mereka yang tidak menentu.

Penyuluh sebagai komunikator juga berfungsi sebagai jembatan informasi antara pemerintah dan kelompok nelayan. Menurut Nurdin & Abubakar (2020), keberhasilan komunikasi dalam penyuluhan sangat bergantung pada kemampuan penyuluh menyederhanakan istilah teknis menjadi bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat. Hal ini tampak di lapangan, di mana penyuluh menggunakan analogi kehidupan sehari-hari dalam menjelaskan isu-isu teknis seperti cuaca laut, alat tangkap ramah lingkungan, atau cara meningkatkan hasil tangkapan. Komunikasi yang sederhana namun efektif inilah yang menjadi kunci dalam meningkatkan partisipasi aktif kelompok nelayan terhadap berbagai program pembangunan yang dijalankan.

Namun demikian, efektivitas komunikasi penyuluh sangat dipengaruhi oleh kondisi eksternal seperti waktu yang terbatas, rendahnya literasi teknologi pada sebagian nelayan, serta belum optimalnya dukungan media penyuluhan seperti poster, modul, atau audiovisual. Oleh karena itu, penting bagi instansi terkait untuk memperkuat kapasitas penyuluh dalam bidang komunikasi publik dan pemanfaatan teknologi informasi. Dengan demikian, penyuluh tidak hanya menjadi penyampai informasi, tetapi juga agen perubahan yang mampu membangun jejaring komunikasi yang kuat dan berkelanjutan antara pemerintah, kelompok nelayan, dan pihak terkait lainnya.

Peran Penyuluh Perikanan sebagai Motivator dalam Pengembangan Kelompok Nelayan

Penyuluh perikanan juga memainkan peran sebagai motivator yang membantu membangun semangat nelayan untuk aktif dalam kelompok. Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa penyuluh secara aktif mendorong nelayan untuk tetap semangat dalam mengikuti kegiatan kelompok, meskipun banyak dari mereka menghadapi tantangan ekonomi dan keterbatasan waktu akibat rutinitas melaut. Dalam beberapa kegiatan kelompok, penyuluh memberikan apresiasi kepada anggota yang aktif, memfasilitasi diskusi untuk menyelesaikan masalah internal, serta memberikan motivasi agar kelompok tetap solid dalam mencapai target bersama. Nelayan menyampaikan bahwa penyuluh sering menyampaikan kisah sukses dari kelompok lain sebagai inspirasi, serta memberikan pandangan positif tentang potensi perikanan lokal jika dikelola dengan baik.

Hal ini membuktikan bahwa penyuluh tidak hanya hadir sebagai informan teknis, tetapi juga sebagai sumber semangat bagi keberlanjutan kelompok. Data menunjukkan bahwa 55,6% responden menilai penyuluh “berperan” dan 44,4% “sangat berperan” dalam memberikan motivasi. Menurut Jumain et al. (2018), penyuluh perikanan tidak hanya bertugas memberikan informasi teknis, tetapi juga harus mampu memberikan dorongan moral dan membangun kesadaran kolektif dalam kelompok nelayan. Temuan ini menunjukkan bahwa motivasi yang diberikan oleh penyuluh dapat meningkatkan partisipasi nelayan dalam kegiatan penyuluhan dan pembangunan kelompok.

Peran motivator ini sejalan dengan konsep penyuluhan partisipatif yang dikemukakan oleh Nurhadi & Yenni (2019), yang menyatakan bahwa penyuluh harus mampu memotivasi kelompok untuk memiliki rasa percaya diri, keberanian mengambil keputusan, dan inisiatif dalam mengelola sumber daya. Di Kelurahan Sumpang Binangae, mayoritas anggota kelompok nelayan memiliki tingkat pendidikan menengah ke bawah dan penghasilan yang terbatas, sehingga kehadiran penyuluh sebagai motivator menjadi sangat penting dalam mengubah pola pikir mereka dari pasif menjadi lebih proaktif. Dengan dorongan dan kepercayaan yang diberikan oleh penyuluh, nelayan menjadi lebih berani mengutarakan pendapat, mengusulkan program, dan bahkan mencoba inovasi sederhana yang sebelumnya dianggap sulit dilakukan.

Namun, efektivitas motivasi penyuluh juga ditentukan oleh hubungan emosional dan kedekatan personal antara penyuluh dan nelayan. Penyuluh yang mampu membangun relasi yang hangat dan saling percaya akan lebih mudah membangkitkan semangat kelompok untuk maju bersama. Oleh karena itu, pelatihan soft skill seperti keterampilan kepemimpinan, komunikasi interpersonal, dan pendekatan psikologis sangat diperlukan bagi para penyuluh. Dengan begitu, peran motivator dapat dijalankan secara maksimal, tidak hanya untuk mempertahankan partisipasi nelayan, tetapi juga untuk membentuk kelompok yang adaptif, solid, dan berorientasi pada kemajuan bersama.

Kendala dalam Penyuluhan

Kendala utama yang diidentifikasi antara lain:

- a. Keterbatasan Waktu dan Partisipasi Nelayan: Sebagian besar nelayan menggunakan waktunya untuk melaut, sehingga waktu untuk mengikuti penyuluhan sangat terbatas. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyuluh dan pengamatan langsung di lapangan, ditemukan bahwa sebagian besar nelayan di Kelurahan Sumpang Binangae melaut pada malam hingga pagi hari, dan waktu siang hari mereka manfaatkan untuk beristirahat. Kondisi ini menyebabkan penyuluh kesulitan menentukan waktu yang tepat untuk melakukan kegiatan penyuluhan. Dalam beberapa kasus, penyuluh hanya dapat berinteraksi dengan nelayan dalam waktu singkat, misalnya saat nelayan sedang bersiap-siap melaut atau setelah mereka kembali ke darat. Partisipasi nelayan dalam kegiatan kelompok pun menjadi sangat fluktuatif karena aktivitas melaut dianggap lebih prioritas dibandingkan menghadiri pertemuan kelompok. Hal ini sejalan dengan temuan Hurrul et al. (2017), bahwa kebiasaan nelayan beristirahat sepulang melaut menjadi penghambat utama dalam proses penyuluhan yang terjadwal secara formal..
- b. Kekurangan Tenaga Penyuluh: Hanya terdapat satu penyuluh di kelurahan ini yang harus membina sepuluh kelompok, yang menyebabkan beban kerja menjadi sangat tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya terdapat satu penyuluh perikanan yang aktif membina seluruh kelompok nelayan di Kelurahan Sumpang Binangae. Total terdapat sepuluh kelompok nelayan yang harus dibina, masing-masing dengan kebutuhan, dinamika, dan permasalahan yang berbeda. Penyuluh mengaku mengalami kesulitan untuk mengatur jadwal kunjungan lapangan dan membagi waktu secara adil ke seluruh kelompok. Akibatnya, beberapa kelompok menerima pendampingan secara tidak rutin dan tidak mendalam. Ketimpangan ini berdampak pada rendahnya efektivitas penyampaian informasi dan lemahnya kontrol terhadap

keberlangsungan kegiatan kelompok. Hal ini memperkuat pendapat Vinsensius et al. (2024) yang menyatakan bahwa distribusi tenaga penyuluh yang tidak merata sangat berpengaruh terhadap efektivitas dan pemerataan hasil penyuluhan.

- c. Keterbatasan Sarana dan Prasarana: Kurangnya tempat yang representatif dan alat bantu penyuluhan menghambat penyuluh dalam menyampaikan materi secara optimal. Berdasarkan hasil penelitian, kegiatan penyuluhan sebagian besar masih dilakukan secara informal, baik di rumah anggota kelompok atau di tempat pelelangan ikan yang tidak sepenuhnya kondusif untuk proses pembelajaran. Selain tempat yang kurang representatif, penyuluh juga menyampaikan bahwa mereka tidak memiliki cukup media bantu seperti poster, modul, atau alat peraga lainnya untuk menjelaskan materi teknis kepada nelayan. Hal ini menyebabkan pemahaman peserta terhadap materi penyuluhan tidak merata, apalagi bagi nelayan yang memiliki tingkat pendidikan rendah. Ketidadaan fasilitas ini tidak hanya menghambat proses penyampaian informasi tetapi juga mengurangi minat nelayan untuk mengikuti kegiatan penyuluhan. Fitria (2019) juga menekankan bahwa keterbatasan fasilitas dan media pendukung merupakan salah satu penyebab utama rendahnya efektivitas kegiatan penyuluhan di lapangan.

Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi terhadap Efektivitas Penyuluhan

Data karakteristik responden menunjukkan bahwa seluruh responden adalah laki-laki, dengan mayoritas usia produktif (rata-rata 40,9 tahun) dan latar belakang pendidikan SMA (50%). Mayoritas responden juga berprofesi sebagai nelayan (94,4%) dengan pendapatan bulanan di bawah Rp 2.000.000. Kondisi ini menggambarkan bahwa nelayan di wilayah ini berada dalam kategori ekonomi menengah ke bawah dan berpendidikan sedang. Menurut Rinda (2017), tingkat pendidikan dan ekonomi masyarakat pesisir berpengaruh terhadap penerimaan dan pemahaman mereka terhadap program-program pembangunan perikanan. Oleh karena itu, penyuluh harus mampu menyesuaikan metode penyuluhan dengan karakteristik kelompok sasaran, seperti menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan mengaitkan materi dengan kebutuhan riil nelayan. Selain itu, tanggungan keluarga yang cukup besar (mayoritas memiliki 2–3 tanggungan) dapat memengaruhi partisipasi aktif dalam kegiatan penyuluhan.

Hasil wawancara langsung di lapangan, sebagian nelayan menyatakan bahwa mereka bersedia mengikuti penyuluhan hanya jika waktu dan tempatnya tidak mengganggu rutinitas mereka dalam mencari nafkah. Beberapa dari mereka menganggap bahwa kegiatan penyuluhan belum sepenuhnya berdampak langsung terhadap peningkatan pendapatan, sehingga motivasi untuk hadir menjadi rendah. Ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan ekonomi tidak hanya memengaruhi ketersediaan waktu, tetapi juga persepsi terhadap manfaat penyuluhan itu sendiri. Oleh karena itu, strategi penyuluhan harus menasar kebutuhan praktis yang relevan dengan kondisi mereka, misalnya pelatihan peningkatan hasil tangkapan, pengelolaan keuangan keluarga, atau akses ke bantuan sosial dan alat tangkap yang disubsidi.

Selain faktor ekonomi, tingkat pendidikan juga menjadi salah satu variabel penting dalam keberhasilan penyuluhan. Hasil observasi menunjukkan bahwa penyuluh sering kali harus mengulang penjelasan atau menyederhanakan materi teknis agar lebih mudah dimengerti. Nelayan

dengan latar belakang pendidikan rendah cenderung membutuhkan pendekatan visual dan praktik langsung dibandingkan penyampaian secara verbal atau tertulis. Menurut Nur Hasanah et al. (2021), penyuluhan yang efektif harus dirancang sesuai dengan kapasitas literasi sasaran. Oleh karena itu, penggunaan media bantu seperti gambar, simulasi sederhana, atau demonstrasi lapangan menjadi alternatif yang sangat penting untuk meningkatkan pemahaman nelayan. Hal ini tidak hanya mempercepat proses adopsi inovasi, tetapi juga meningkatkan kepercayaan nelayan terhadap peran penyuluh sebagai pendamping pembangunan perikanan (Ariyanto et al., 2022; KKP, 2023).

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa penyuluh perikanan memiliki peran signifikan dalam pengembangan kelompok nelayan sebagai fasilitator, komunikator, dan motivator. Namun, efektivitas peran tersebut masih dibatasi oleh kendala struktural dan teknis yang memerlukan intervensi sistemik dari pemerintah dan pemangku kepentingan lain. Secara praktis, penguatan agrobisnis perikanan di tingkat akar rumput memerlukan: (1) Penambahan jumlah penyuluh yang terdistribusi merata; (2) Peningkatan kapasitas penyuluh dalam literasi digital dan komunikasi partisipatif; dan (3) Penyediaan sarana dan insentif kelembagaan untuk mendukung program penyuluhan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Ariyanto, T., Siregar, Y. S., & Darwis, D. (2022). Model Pemberdayaan Nelayan Melalui Pendekatan Ekosistem Kelembagaan. *Jurnal Sosial Maritim*, 9(1), 1–12.
- Fitria. 2019. Peran Penyuluhan Perikanan Dalam Membina Kelompok Pengolah dan Pemasaran “Mekar Bersama” Di Kelurahan Muara Sembilang Kecamatan Semboja Kabupaten Kutai Kartanegara. Skripsi. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman, Samarinda. (Tidak dipublikasikan).
- Fitriani, R., Akbar, M., & Lestari, D. (2023). Penyuluhan Berbasis Digital dalam Meningkatkan Kinerja Pokdakan. *Jurnal Agromina*, 15(2), 76–84.
- Garudhea Asmara R.R. 2018. Komunikasi Penyuluhan pada Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Berbasis Kearifan Lokal. . *Jurnal Penyuluhan Perikanan dan Kelautan*. Vol. 12, No.2.
- Handayani, R., Fadilah, N., & Mulyadi, A. (2023). Strategi Penyuluhan Partisipatif pada Komunitas Nelayan Tradisional. *Jurnal Pengembangan Masyarakat*, 10(1), 89–97.
- Hurrul, et.al. 2017. Peran Penyuluh Dalam Agribisnis Perikanan Air Payau Di Kabupaten Bangkalan Madura. *Jurnal SEP*. Vol. 10, No.1.
- Jasmine A. P, et.al. 2019. Analisis Permasalahan Perikanan: Strategi Penyuluhan Perikanan di Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka. *Jurnal Penyuluhan Perikanan dan Kelautan*. Vol. 13, No.2.
- Jumain, et.al. 2018. Peranan Penyuluh Perikanan Untuk Meningkatkan Produksi Dan Pendapatan Pembudidaya Tambak Di Kabupaten Sinjai. *Jurnal Of Aquac. Environment*. Vol. 1, No. 1.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2023). Rencana Strategis Penyuluhan Perikanan 2020–2024. Jakarta: KKP.

- Nayu N, et.al. 2023. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Anggota Kelompok dan Dampaknya terhadap Perkembangan Usaha Perikanan. *Jurnal Penyuluhan Perikanan dan Kelautan*. Vol. 17, No. 3.
- Neni Kartini, et.al. 2023. Hubungan Antara Peran Penyuluh Perikanan Dengan Partisipasi Pembudidaya Pembenihan Ikan Gurami (*Osphronemus Goramy*) Di Kota Tasikmalaya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Agroonfo Galuh*. Vol. 10, No. 3.
- Noor F, A., et.al. 2023. Peran Penyuluh Perikanan dalam Membina Kleompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) di Kecamatan Balikpapan Tiimur, Kota Balikpapan. *Jurnal Pembangunan Peirikanan dan Agribisnis*. Vol. 10, No.1
- Norbertus Citra. I. 2023. Peran Penyuluh dalam Mengembangkan Korporasi Pertanian Terpadu Keluarga dan Mempromosikan Keberlanjutan Melalui Pendidikan, Pelatihan, Konsultasi, dan Bimbingan. *Jurnal Agriekstentsia*. Vol. 22, No.1.
- Nurdin & Abubakar. 2020. Karakteristik dan Kinerja Penyuluh Perikanan di Kabupaten Bogor. *Jurnal Penyuluhan Perikanan dan Kelautan*. Vol. 14, No. 2.
- Nurhadi & Yenni. 2019. Kegiatan Penyuluhan Perikanan Di Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon. *Jurnal Buletin*. Vol. 1, No.1.
- Nur Hasanah, et.al. 2021. Persepsi Pembudidaya Ikan Terhadap Peran Penyuluh Perikanan di Desa Muara Aloh Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Pembangunan Perikanan dan Agribisnis*. Vol. 9, No. 2.
- Pranata, D., & Ismail, M. (2022). Pendekatan Broker Inovasi dalam Penyuluhan Agrobisnis. *Jurnal Inovasi Pertanian*, 18(3), 45–56.
- Rinda Noviyanti. 2017. Peran Penyuluh Bagi Nelayan di Kelurahan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Berkala Perikanan Terubuk*. Vol. 45, No. 2.
- Rio & Junianto. 2024. Implementasi Tupoksi Pppk Dan Ppb Sesuai Peraturan Kepala Brsdm Kp No 63/2022 Di Kabupaten Bogor. *Jurnal Perikanan*. Vol. 14, No.1.
- Setiawan, A., & Mahdalena, S. (2024). Integrasi WhatsApp dalam Penyuluhan Perikanan Tangkap. *Jurnal Teknologi Komunikasi Kelautan*, 3(1), 23–31.
- Syamsuddin, S., & Alimuddin, M. (2022). Penyuluhan Perikanan dan Ketahanan Usaha Nelayan Kecil. *Jurnal Agribisnis Pesisir*, 6(2), 14–27.
- Vinsensius Pai, Et.Al. 2024. Peran Media Penyuluhan (Studi Kasus Pada Kelompok “Gawi Bersama Dan Baimbai Sejahtera”) Di Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Pembangunan Perikanan Dan Agribisnis*. Vol. 11, No.1.
- Wibowo, H., Nugraha, D., & Wulandari, F. (2023). Peran Penyuluh sebagai Fasilitator Agrobisnis Ikan di Daerah Tertinggal. *Jurnal Ekonomi Perikanan*, 11(4), 117–125.
- Yenni N, et.al. 2023. Identifikasi Potensi Perikanan dan Penyuluhan Perikanan di Kecamatan Sindangwangi Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Penyuluhan Perikanan dan Kelautan*. Vol. 17, No. 3.